

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.

Pembentukan masyarakat madani adalah merupakan sebagai bentuk perjuangan kelompok sosial untuk memperoleh otonomi. Kelompok tersebut adalah merupakan kelompok marginal, yang menikmati ketertindasan politik, ekonomi dan sosial termasuk rasa ketidakadilan dan pemerataan dalam hukum. Pengalaman Bangsa Indonesia ketika keruntuhan Orde Baru merupakan contoh yang sangat signifikan dimana realitas masyarakat madani menuju kebangkitan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat merasa tidak memiliki kemerdekaan alam mengemukakan pendapat dan tidak mampu untuk berpartisipasi secara produktif dalam proses pembangunan.

Konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat beradab yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perlu diketahui bahwa keberhasilan sebuah kebijakan dan program pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam

mengimplementasikan program dan kebijakan tersebut. Tingkat kualitas partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Di samping itu, pendidikan juga dipahami sebagai sebuah proses penyiapan warga negara untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Partisipasi politik warga negara berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melakukan kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan.

Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hal-hal sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi.

Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu Negara. Mas'oed (2003:43), menegaskan pengertian demokrasi secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, maka warga Negara

berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dan mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi. Baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut dalam kampanye maupun partai politik.

Partisipasi politik menurut Damsar (2010:180), dapat diartikan sebagai “Kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan masyarakat madani merupakan kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Diketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga Negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan yang dibuat pemerintah tersebut.

Adanya kebebasan masyarakat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokratis dalam suatu Negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figure

yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislative dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figure yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan rakyat melalui pemilu.

Partisipasi politik dan perilaku memilih adalah paket dalam diskusi pemilu. Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sedang perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Oleh karena itu dapat dilihat hubungan yang erat antara demokrasi, partisipasi politik, pemilihan umum, partai politik dan perilaku memilih.

Keterlibatan masyarakat di dalam Pemilihan Umum Presiden 8 Juli 2009 yang lalu di kelurahan Marulak Hilir merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin untuk 5 (lima tahun) mendatang. Di kelurahan tersebut terdapat 10 (sepuluh) TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3521 orang.

Peneliti tertarik untuk meneliti di daerah ini karena masyarakatnya heterogen dan cenderung aktif di dalam kampanye (wawancara dengan sekretaris kelurahan). Peneliti ingin mengetahui partisipasi politik yang tercermin di dalam masyarakat kelurahan Tanjung Marulak Hilir ini, baik itu melalui pemungutan suara, kampanye dan keanggotaan seseorang dalam partai politik di dalam Pemilu Presiden tahun 2009 yang akhirnya akan menunjukkan tingkat partisipasi politik

warga negara dalam melestarikan masyarakat madani di kelurahan Tanjung Marulak Hilir ini

Untuk mengkaji masalah di atas, maka peneliti mencoba mengadakan penelitian dengan mengangkat sebuah judul yakni : “Tingkat Partisipasi politik Warga Negara dalam Melestarikan Masyarakat Madani (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi”.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diperkirakan muncul berkenaan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam melestarikan masyarakat madani di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, antara lain :

1. Partisipasi politik warga negara dalam melestarikan masyarakat madani
2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami makna masyarakat madani, yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral bersikap terbuka dan demokratis dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.
3. Sebagian besar masyarakat enggan melakukan hak pilih.
4. Adanya rasa pasif dalam mengikuti kegiatan politik.
5. Warga masyarakat enggan menghadiri setiap kegiatan politik (kampanye), karena masyarakat menganggap bahwa pemilihan presiden tidak memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat.
6. Adanya pengaruh negatif propaganda politik dari elit penguasa.

7. Sikap masyarakat kurang menyadari rasa partisipasi politik, sehingga lebih kompleks lagi apabila mengarah pada sikap apatis dan sinisme terhadap pemilihan umum.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka peneliti membuat batasan masalah yaitu partisipasi politik warga negara dalam melestarikan masyarakat madani yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma, hukum, moral bersikap terbuka dan demokratis dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

D. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini, dijabarkan ke dalam pernyataan berikut yakni, bagaimana tingkat partisipasi politik warga negara dalam melestarikan masyarakat madani di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat partisipasi politik warga negara dalam melstarikan masyarakat madani di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan ada manfaatnya yaitu :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang ilmu politik, terutama sebagai pembelajaran dan memberikan informasi mengenai hubungan antara partisipasi politik, pemilihan umum dan perilaku politik masyarakat serta bagi peneliti sendiri agar dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan dari teori-teori politik yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan civitas akademika.
3. Secara operasional penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literature bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Dalam Negeri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat untuk melihat bagaimana partisipasi politik dalam melestarikan masyarakat madani sehingga untuk kedepannya perolehan suara dari masyarakat itu dapat dimaksimalkan.



THE
Character Building
UNIVERSITY